



Pengaruh Demografi dan Ekonomi Terhadap Perencanaan Pelaporan Pajak Penghasilan Guru Akhir Tahun di Sekolah Dasar Yang Terdapat di Kabupaten Solok

Rita Dwi Putri^{1*}, Chintya Maharani², Natasya³, Tevi Putri⁴, Marisa Penriani⁵,
Hidayanti Fitra⁶

¹⁻⁶ Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok, Indonesia

Alamat: Jl. Jenderal Sudirman No.6, Kota Solok, Sumatera Barat

*Korespondensi penulis: ritadwiputri02@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the influence of demographic factors on the compliance of income tax (PPh) reporting among elementary school teachers in Padang City. Compliance with income tax reporting is crucial in supporting a sound and fair tax system. The demographic factors examined in this study include age, education level, and length of teaching. These three factors were chosen because they have the potential to influence teachers' level of understanding and awareness regarding their tax obligations. A quantitative approach was used in this study using a survey method conducted in Padang City. Data collection was conducted by distributing questionnaires to 39 respondents who were elementary school teachers in the area. The distributed questionnaires contained questions related to demographic factors and income tax reporting compliance. The collected data were then analyzed using a normality test and multiple linear regression to examine the influence of demographic factors on PPh reporting compliance. The results of the normality test showed that the data obtained were normally distributed, meaning the collected data could be used for further analysis. A multiple linear regression test was used to determine the simultaneous influence of demographic factors on PPh reporting compliance. The results of the analysis showed that demographic factors simultaneously had a significant effect on PPh reporting compliance among elementary school teachers in Padang City. This indicates that teachers' demographic characteristics, such as age, education level, and length of teaching, are closely related to their awareness of reporting income tax. Partially, the test results indicate that age and education level significantly influence compliance with income tax reporting. Older teachers tend to have a better understanding of tax obligations, while teachers with higher education levels are also more aware of the importance of reporting their taxes correctly.*

Keywords: *compliance, demographic factors, income tax, tax reporting, teachers*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor demografi terhadap kepatuhan pelaporan pajak penghasilan (PPh) guru sekolah dasar di Kota Padang. Kepatuhan pelaporan pajak penghasilan merupakan hal yang penting dalam mendukung sistem perpajakan yang baik dan adil. Faktor demografi yang diteliti dalam penelitian ini meliputi usia, tingkat pendidikan, dan lama mengajar. Ketiga faktor ini dipilih karena memiliki potensi untuk mempengaruhi tingkat pemahaman dan kesadaran guru terkait kewajiban perpajakan mereka. Pendekatan kuantitatif digunakan dalam penelitian ini dengan metode survei yang dilaksanakan di Kota Padang. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada 39 responden yang merupakan guru sekolah dasar di wilayah tersebut. Kuesioner yang disebarikan berisi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan faktor demografi dan kepatuhan pelaporan pajak penghasilan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan uji normalitas dan regresi linier berganda untuk menguji pengaruh faktor demografi terhadap kepatuhan pelaporan PPh. Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data yang diperoleh berdistribusi normal, yang berarti data yang dikumpulkan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. Uji regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh simultan dari faktor demografi terhadap kepatuhan pelaporan PPh. Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor demografi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan PPh guru sekolah dasar di Kota Padang. Ini menunjukkan bahwa karakteristik demografis guru seperti usia, tingkat pendidikan, dan lama mengajar memiliki hubungan yang erat dengan kesadaran mereka dalam melaporkan pajak penghasilan. Secara parsial, hasil uji menunjukkan bahwa variabel usia dan tingkat pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pelaporan PPh. Guru yang lebih tua cenderung memiliki tingkat pemahaman yang lebih baik terhadap kewajiban perpajakan, sementara guru dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi juga lebih menyadari pentingnya melaporkan pajak mereka dengan benar.

Kata kunci: faktor demografi, guru, kepatuhan, pajak penghasilan, pelaporan pajak

1. LATAR BELAKANG

Pelaporan pajak penghasilan merupakan kewajiban setiap warga negara, termasuk guru sebagai aparatur sipil negara dan tenaga pendidik non-ASN. Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) 21, yang dilakukan menjelang akhir tahun, menjadi momen penting dalam pengelolaan keuangan pribadi guru, khususnya di daerah-daerah seperti Kabupaten Solok. Dalam konteks ini, dua faktor penting yang sangat berpengaruh terhadap proses perencanaan pelaporan pajak adalah faktor demografi dan kondisi ekonomi. Keduanya memengaruhi kesadaran, kemampuan, dan kepatuhan guru dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Secara demografis, Kabupaten Solok merupakan wilayah dengan karakteristik penduduk yang cukup beragam dari sisi usia, tingkat pendidikan, status pekerjaan, dan persebaran wilayah antara dataran rendah dan pegunungan. Menurut BPS (2023), jumlah penduduk Kabupaten Solok pada tahun 2022 mencapai sekitar 405.000 jiwa, dengan dominasi penduduk usia produktif. Namun, tingkat pendidikan masyarakat, termasuk sebagian tenaga pendidik di tingkat Sekolah Dasar (SD), masih tergolong rendah. Hanya sebagian kecil dari guru di daerah ini yang memiliki latar belakang pendidikan S-1 ke atas, khususnya di daerah terpencil yang sulit dijangkau. Rendahnya tingkat pendidikan ini turut memengaruhi pemahaman mereka terhadap sistem perpajakan yang dinamis dan membutuhkan pengetahuan administratif yang memadai (Putri & Suryani, 2021).

Dari sisi ekonomi, Kabupaten Solok masih tergolong sebagai daerah berkembang dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita yang relatif rendah. Data dari BPS Sumatera Barat (2023) menunjukkan bahwa PDRB per kapita Kabupaten Solok pada tahun 2022 sebesar Rp 39,67 juta, yang naik menjadi Rp 42,72 juta pada 2023. Namun, pertumbuhan ekonomi ini belum sepenuhnya berdampak signifikan pada peningkatan kesejahteraan guru, khususnya guru honorer yang penghasilannya masih jauh dari kata layak. Banyak guru honorer yang menerima gaji di bawah Upah Minimum Regional (UMR), sehingga tidak seluruhnya memiliki kesadaran atau kewajiban untuk melaporkan pajak secara formal (Yuliana & Hidayat, 2022). Perbedaan signifikan antara penghasilan guru PNS dan non-PNS juga menyebabkan variasi kepatuhan pajak di kalangan pendidik (Anugrah & Nasution, 2020).

Pelaporan pajak yang dilakukan di akhir tahun sangat dipengaruhi oleh kesiapan individu dalam merencanakan dan mengelola informasinya. Perencanaan ini mencakup pemahaman atas penghasilan bruto, pengurangan yang diperkenankan (seperti iuran pensiun, biaya jabatan), serta penghitungan pajak terutang. Namun, tingkat literasi pajak di kalangan guru di daerah rural seperti Solok cenderung masih rendah, sebagaimana dikemukakan oleh Amri dan Wahyuni (2021), bahwa tingkat pemahaman guru terhadap aspek

teknis pelaporan PPh 21 masih di bawah standar, khususnya dalam aspek penggunaan aplikasi e-filing dan e-SPT. Hal ini semakin diperparah oleh kurangnya pelatihan perpajakan secara berkala dari otoritas pajak setempat atau Dinas Pendidikan.

Sementara itu, aspek demografi seperti usia dan pengalaman kerja juga terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Guru yang lebih tua atau memiliki masa kerja lebih panjang cenderung memiliki pengalaman administratif yang lebih baik, sehingga lebih mampu merencanakan pelaporan pajaknya secara sistematis (Siregar & Wulandari, 2021). Sebaliknya, guru muda, apalagi yang berstatus honorer dan belum memiliki NIP resmi, sering kali tidak memahami pentingnya pelaporan pajak, atau bahkan tidak menyadari bahwa mereka memiliki kewajiban tersebut.

Di sisi lain, faktor ekonomi makro, seperti inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok, turut menekan daya beli guru, yang berdampak pada prioritas pengeluaran dan sikap terhadap kewajiban membayar pajak (Marzuki & Hasanah, 2023). Dalam konteks ini, persepsi bahwa membayar pajak hanya menambah beban hidup turut menjadi alasan rendahnya motivasi untuk merencanakan pelaporan pajak secara benar. Menurut penelitian oleh Lestari dan Handayani (2021), persepsi negatif terhadap pajak, terutama di kalangan pendidik dengan penghasilan menengah ke bawah, menjadi hambatan utama dalam implementasi sistem perpajakan yang adil dan partisipatif.

Aspek kebijakan perpajakan yang terus berubah juga menjadi tantangan tersendiri. Pemerintah melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023 memperkenalkan beberapa perubahan penting, seperti sistem tarif progresif baru, batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang diperbarui, serta kemudahan pelaporan melalui platform digital. Namun, adopsi teknologi ini belum merata di sekolah-sekolah dasar di daerah pedesaan, mengingat keterbatasan infrastruktur dan literasi digital guru (Pratiwi & Huda, 2022). Oleh karena itu, tanpa strategi perencanaan yang jelas, guru di Kabupaten Solok sangat mungkin mengalami kesalahan dalam pelaporan atau bahkan tidak melaporkan pajak sama sekali.

Dengan mempertimbangkan kombinasi antara faktor demografi (usia, status kepegawaian, tingkat pendidikan) dan faktor ekonomi (tingkat penghasilan, inflasi lokal, kondisi kesejahteraan), maka penting dilakukan kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana kedua aspek ini memengaruhi perencanaan pelaporan pajak penghasilan guru, khususnya menjelang akhir tahun. Kajian ini tidak hanya akan memberikan gambaran empirik tentang kondisi di lapangan, tetapi juga dapat memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah dan instansi perpajakan untuk meningkatkan kesadaran pajak di kalangan

tenaga pendidik. Hal ini menjadi penting karena kepatuhan pajak tidak hanya berkaitan dengan penerimaan negara, tetapi juga mencerminkan kualitas tata kelola administrasi publik di sektor pendidikan (Kurniawan & Widodo, 2022).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif korelasional. Pendekatan kuantitatif dipilih karena bertujuan untuk mengukur sejauh mana hubungan antara variabel demografi dan ekonomi terhadap perencanaan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) guru Sekolah Dasar (SD) menjelang akhir tahun. Penelitian korelasional digunakan untuk mengetahui kekuatan dan arah hubungan antara variabel bebas (demografi dan ekonomi) dan variabel terikat (perencanaan pelaporan pajak penghasilan). Desain penelitian ini memungkinkan peneliti memperoleh data numerik yang dapat dianalisis secara statistik, guna menggambarkan dan menginterpretasikan fenomena yang diteliti secara objektif dan terukur.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru Sekolah Dasar yang berada di wilayah Kabupaten Solok, baik yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun guru honorer. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Solok (2023), jumlah guru SD mencapai sekitar 3.500 orang yang tersebar di berbagai kecamatan. Untuk menentukan jumlah sampel, digunakan teknik purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut: (1) guru yang telah mengajar minimal dua tahun, (2) memiliki penghasilan tetap, baik melalui gaji pokok maupun honor bulanan, dan (3) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dengan mempertimbangkan waktu dan sumber daya, sampel yang diambil sebanyak 100 orang guru dari berbagai sekolah yang mewakili wilayah pusat, pinggiran, dan daerah terpencil.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah kuesioner yang disusun berdasarkan indikator dari masing-masing variabel penelitian. Variabel demografi mencakup usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status kepegawaian (PNS atau honorer), dan lama mengajar. Variabel ekonomi mencakup jumlah penghasilan per bulan, jumlah tanggungan keluarga, dan akses terhadap sumber daya ekonomi (misalnya, pekerjaan sampingan atau bantuan pemerintah). Sementara itu, variabel perencanaan pelaporan pajak penghasilan mencakup pemahaman terhadap sistem PPh 21, frekuensi pelatihan perpajakan yang pernah diikuti, ketepatan dalam pelaporan pajak, serta penggunaan aplikasi pelaporan pajak seperti e-Filing. Kuesioner menggunakan skala Likert dengan lima tingkat pilihan jawaban, mulai dari “sangat tidak setuju” hingga “sangat setuju”, untuk menggambarkan persepsi dan perilaku responden secara lebih mendalam.

Sebelum digunakan, instrumen kuesioner diuji validitas dan reliabilitasnya. Uji validitas dilakukan dengan menggunakan korelasi Pearson Product Moment, sedangkan reliabilitas diuji menggunakan rumus Cronbach's Alpha. Hasil uji menunjukkan bahwa semua item memiliki nilai validitas di atas r tabel dan nilai reliabilitas $> 0,7$, yang berarti instrumen layak digunakan dalam penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan selama dua minggu dengan bantuan beberapa enumerator yang telah dilatih. Kuesioner dibagikan secara langsung kepada guru di sekolah-sekolah yang telah ditentukan sebelumnya, dengan tetap memperhatikan etika penelitian seperti menjaga kerahasiaan identitas responden dan memperoleh persetujuan sebelum mengisi kuesioner. Beberapa kuesioner juga disebar melalui formulir digital menggunakan Google Forms, terutama untuk menjangkau guru di daerah yang sulit dijangkau secara fisik.

Setelah data terkumpul, dilakukan proses pengolahan dan analisis menggunakan bantuan perangkat lunak statistik, yaitu SPSS versi 26. Analisis data dimulai dari uji deskriptif untuk mengetahui distribusi karakteristik responden dan variabel penelitian. Selanjutnya, dilakukan uji asumsi klasik, termasuk uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas, guna memastikan kelayakan data untuk dianalisis lebih lanjut. Untuk mengetahui pengaruh antar variabel, digunakan teknik analisis regresi linear berganda. Persamaan regresi dibentuk untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel demografi dan ekonomi secara simultan maupun parsial terhadap perencanaan pelaporan pajak penghasilan guru.

Dalam penelitian ini, tingkat signifikansi yang digunakan adalah 5% ($\alpha = 0,05$). Jika nilai signifikansi $< 0,05$, maka pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dianggap signifikan. Selain itu, digunakan nilai koefisien determinasi (R^2) untuk melihat sejauh mana variabel demografi dan ekonomi mampu menjelaskan variasi dari variabel perencanaan pelaporan pajak. Semakin tinggi nilai R^2 , maka semakin besar kontribusi kedua variabel terhadap variabel terikat. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan pemahaman guru SD mengenai pentingnya perencanaan pelaporan pajak, serta memberikan masukan kepada pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang relevan, khususnya dalam bidang pelatihan pajak dan peningkatan literasi fiskal di lingkungan pendidikan dasar.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Normalitas

| Statistik | Nilai |
|-------------------------------------|----------|
| N | 72 |
| Mean Residual | 0.000000 |
| Std. Deviation | 7.110978 |
| Test Statistic (Kolmogorov-Smirnov) | 0.090 |
| Sig. (Asymp. Sig. 2-tailed) | 0.200 |

Interpretasi:

Nilai signifikansi (Asymp. Sig. 2-tailed) sebesar $0.200 > 0.05$, sehingga **data residual berdistribusi normal**. Ini menunjukkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinearitas

| Variabel | Tolerance | VIF |
|----------|-----------|-------|
| X1 | 0.955 | 1.047 |
| X2 | 0.955 | 1.047 |

Interpretasi:

Semua nilai VIF < 10 dan nilai tolerance > 0.1 , sehingga **tidak terdapat gejala multikolinearitas** antar variabel bebas (X1 dan X2).

Uji Heteroskedastisitas

| Model | B | Std. Error | t | Sig. |
|------------|--------|------------|--------|-------|
| (Constant) | 7.379 | 2.845 | 2.593 | 0.012 |
| X1 | 0.172 | 0.190 | 0.908 | 0.367 |
| X2 | -0.444 | 0.289 | -1.536 | 0.129 |

Dependent Variable: Abs_RES

Interpretasi:

Uji heteroskedastisitas dilakukan menggunakan regresi terhadap nilai absolut residual (Abs_RES). Karena nilai signifikansi X1 = 0.367 dan X2 = 0.129 > 0.05 , maka **tidak terdapat gejala heteroskedastisitas**.

Analisis Regresi Linear Berganda

| Variabel | B | Std. Error | Beta | t | Sig. |
|------------|--------|------------|--------|--------|-------|
| (Constant) | 45.366 | 5.170 | - | 8.774 | 0.001 |
| X1 | 0.057 | 0.345 | 0.020 | 0.164 | 0.870 |
| X2 | -0.397 | 0.525 | -0.093 | -0.755 | 0.453 |

Interpretasi:

- Persamaan regresi linear berganda:

$$Y = 45.366 + 0.057X1 - 0.397X2$$

- Nilai koefisien X1 dan X2 tidak signifikan ($p > 0.05$), artinya **X1 (demografi)** dan **X2 (ekonomi)** tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Y (perencanaan pelaporan pajak).

Uji t (Parsial)

Lihat tabel regresi:

- X1: Sig. 0.870 > 0.05 → tidak berpengaruh signifikan
- X2: Sig. 0.453 > 0.05 → tidak berpengaruh signifikan

Interpretasi: Tidak ada pengaruh signifikan secara parsial dari variabel demografi (X1) maupun ekonomi (X2) terhadap perencanaan pelaporan pajak penghasilan guru.

- Model regresi lolos uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas).
- Namun, **tidak terdapat pengaruh signifikan** baik secara parsial (uji t) dari variabel demografi (X1) dan ekonomi (X2) terhadap perencanaan pelaporan pajak penghasilan.
- Perlu kajian lebih lanjut terhadap variabel lain yang mungkin berpengaruh, seperti literasi pajak, pelatihan, atau kebijakan sekolah.

Dari hasil pengujian di atas Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel demografi dan ekonomi terhadap perencanaan pelaporan pajak penghasilan guru Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Solok menjelang akhir tahun. Berdasarkan hasil uji statistik yang telah dilakukan, diperoleh temuan bahwa baik secara parsial maupun simultan, variabel demografi (X1) dan ekonomi (X2) tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perencanaan pelaporan pajak penghasilan (Y). Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi yang melebihi angka 0,05 pada uji t maupun pada analisis regresi linear berganda. Selain itu, hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan tidak mengalami pelanggaran terhadap asumsi normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas.

Temuan ini menimbulkan beberapa implikasi yang perlu dibahas secara mendalam. Pertama, dari sisi demografi, penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik individu seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan status kepegawaian guru (PNS atau honorer) tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap perilaku atau perencanaan pelaporan pajak penghasilan. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Siregar dan Wulandari (2021), yang menemukan bahwa tidak semua faktor demografis memiliki korelasi langsung terhadap kepatuhan pajak, terutama di lingkungan pendidikan. Salah satu penjelasan rasional dari hasil ini adalah bahwa perencanaan pelaporan pajak bukanlah perilaku yang didasarkan semata-mata pada atribut demografis, melainkan lebih pada kesadaran pajak, akses terhadap informasi perpajakan, serta pemahaman teknis administrasi pajak yang diperoleh melalui pelatihan atau pengalaman.

Dalam konteks guru di Kabupaten Solok, banyak dari mereka yang meskipun secara usia dan tingkat pendidikan telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak, namun belum memiliki pengalaman langsung dalam mengelola pelaporan pajak secara mandiri. Terutama bagi guru honorer, yang gajinya seringkali di bawah batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), kewajiban untuk melaporkan pajak penghasilan cenderung diabaikan karena dianggap tidak relevan atau tidak wajib (Yuliana & Hidayat, 2022). Di samping itu, berdasarkan pengamatan lapangan dan wawancara singkat dengan beberapa responden, banyak guru yang menyerahkan proses pelaporan pajaknya kepada pihak bendahara sekolah, yang menyebabkan mereka tidak memiliki kontrol langsung terhadap proses perencanaan tersebut.

Kedua, dari sisi ekonomi, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa tingkat pendapatan, jumlah tanggungan keluarga, dan kondisi ekonomi keluarga guru tidak secara signifikan memengaruhi perencanaan pelaporan pajak penghasilan. Hal ini cukup menarik karena dalam teori perilaku ekonomi, pendapatan seseorang seharusnya berkorelasi dengan kepatuhan fiskal, terutama dalam hal perencanaan kewajiban pajak (Lestari & Handayani, 2021). Namun, dalam praktiknya, guru di Kabupaten Solok, baik dengan penghasilan tetap maupun variabel, tampaknya belum menjadikan pelaporan pajak sebagai prioritas keuangan mereka, khususnya menjelang akhir tahun.

Ada beberapa faktor yang dapat menjelaskan hal ini. Pertama, belum meratanya literasi pajak di kalangan guru, khususnya guru honorer dan guru di daerah pedesaan, menyebabkan rendahnya pemahaman tentang pentingnya pelaporan pajak yang benar dan tepat waktu. Menurut Pratiwi dan Huda (2022), literasi pajak yang rendah seringkali lebih menentukan kepatuhan pajak dibandingkan jumlah pendapatan itu sendiri. Guru dengan pendapatan yang

cukup besar pun cenderung lalai dalam pelaporan pajak apabila tidak memiliki pemahaman yang baik mengenai prosedur, sanksi, dan manfaat dari pelaporan tersebut.

Kedua, rendahnya akses terhadap pelatihan perpajakan dan teknologi digital juga menjadi penghambat dalam proses perencanaan pajak. Sistem pelaporan pajak elektronik (e-Filing dan e-SPT) yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak masih belum dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh guru di daerah rural seperti Solok. Sebagian besar dari mereka belum terbiasa menggunakan aplikasi pajak secara mandiri, dan masih bergantung pada bantuan pihak sekolah atau konsultan pajak yang hanya hadir secara musiman (Amri & Wahyuni, 2021). Hal ini menjelaskan mengapa variabel ekonomi tidak menunjukkan signifikansi terhadap perencanaan pelaporan, sebab kendala teknis dan pengetahuan menjadi faktor dominan.

Ketiga, dari sudut kebijakan, pemerintah daerah dan instansi pendidikan belum sepenuhnya mendorong kepatuhan dan pelatihan pajak sebagai bagian dari kompetensi profesional guru. Meski Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan sosialisasi terkait peraturan terbaru seperti PP No. 58 Tahun 2023 dan UU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan), pelaksanaannya belum optimal menjangkau kalangan guru, terutama di luar kota. Ini diperparah oleh persepsi bahwa pajak bukanlah tanggung jawab pribadi guru, melainkan urusan pihak sekolah atau instansi pengelola keuangan (Kurniawan & Widodo, 2022). Hal ini memperkuat argumen bahwa kepatuhan pajak tidak semata-mata ditentukan oleh variabel ekonomi individu, melainkan dipengaruhi oleh struktur kelembagaan dan sistem koordinasi perpajakan di tingkat sekolah.

Selain itu, hasil regresi yang menunjukkan nilai koefisien kecil dan tidak signifikan juga menandakan bahwa terdapat variabel lain di luar demografi dan ekonomi yang kemungkinan besar memiliki pengaruh terhadap perencanaan pelaporan pajak penghasilan guru. Variabel seperti literasi fiskal, pengalaman mengikuti pelatihan pajak, dukungan kelembagaan, dan persepsi terhadap keadilan sistem perpajakan, bisa menjadi faktor yang lebih relevan untuk diteliti dalam studi lanjutan. Penelitian oleh Lestari dan Handayani (2021) bahkan menegaskan bahwa persepsi terhadap manfaat pajak, serta kepercayaan terhadap penggunaan pajak oleh negara, turut memengaruhi motivasi individu dalam merencanakan dan melaporkan pajaknya secara bertanggung jawab.

Dengan demikian, meskipun penelitian ini tidak menemukan pengaruh yang signifikan dari demografi dan ekonomi terhadap perencanaan pelaporan pajak penghasilan guru SD di Kabupaten Solok, namun hasil ini tetap memberikan kontribusi penting bagi pengembangan kebijakan pajak dan pendidikan. Pemerintah daerah dan Kementerian Pendidikan perlu menyusun program pelatihan pajak yang lebih sistematis dan berkelanjutan bagi guru, serta

memperluas akses terhadap informasi dan teknologi pelaporan pajak. Selain itu, perlu dilakukan kampanye kesadaran pajak yang tidak hanya menekankan aspek kewajiban, tetapi juga manfaat dan relevansi bagi pembangunan sektor Pendidikan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh faktor demografi dan ekonomi terhadap perencanaan pelaporan pajak penghasilan guru menjelang akhir tahun di sekolah dasar di Kabupaten Solok, dapat disimpulkan bahwa kedua variabel bebas, yakni faktor demografi (X1) dan faktor ekonomi (X2), tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perencanaan pelaporan pajak penghasilan guru (Y). Hal ini dibuktikan dengan hasil uji t yang menunjukkan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, baik untuk X1 (0,367) maupun X2 (0,129), serta nilai koefisien determinasi yang relatif rendah, menunjukkan bahwa variabel independen hanya mampu menjelaskan variasi dalam variabel dependen dalam skala terbatas. Meskipun begitu, secara keseluruhan model regresi menunjukkan hasil yang layak dengan asumsi klasik terpenuhi, seperti uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi yang memberikan hasil dalam batas toleransi wajar. Artinya, meskipun tidak signifikan, model regresi tidak melanggar asumsi dasar statistik.

Temuan ini mengindikasikan bahwa keputusan dan perencanaan guru dalam melaporkan pajak penghasilan mereka menjelang akhir tahun tidak semata-mata dipengaruhi oleh karakteristik demografis seperti usia atau jenis kelamin, maupun kondisi ekonomi seperti pendapatan atau beban tanggungan. Faktor lain seperti pemahaman terhadap regulasi perpajakan, dukungan institusi sekolah, atau kesadaran akan pentingnya kepatuhan pajak mungkin lebih berperan signifikan, dan karenanya perlu dipertimbangkan dalam penelitian lanjutan. Penelitian ini memberikan dasar awal untuk pengembangan kebijakan pendidikan pajak yang lebih efektif dan menyeluruh bagi tenaga pendidik di daerah.

DAFTAR REFERENSI

- Ali, M. (2021). *Perpajakan: Konsep, Aplikasi dan Studi Kasus*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Anggraini, D. (2022). Pengaruh Karakteristik Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak Penghasilan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Pajak*, 7(1), 15-27. <https://doi.org/10.32503/cendekiaakuntansi.v7i4.2946>
- Atmini, S. (2020). Faktor Demografi dan Kepatuhan Pajak di Kalangan Guru Sekolah. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 11(3), 205-218.
- Darussalam, D., & Septriadi, D. (2021). *Perpajakan Internasional*. Jakarta: DDTTC Publishing.

- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). Statistik Pajak Tahunan 2022. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Ghozali, I. (2021). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hidayat, T. (2021). Analisis Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 8(2), 134-145.
- Kurniasih, L., & Sari, M. M. R. (2020). Determinan Kepatuhan Pajak: Studi Empiris pada Guru Sekolah Dasar. *Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis*, 13(1), 88-98.
- Lubis, H. A. (2023). Faktor Ekonomi dalam Kepatuhan Pajak Penghasilan Guru. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(1), 51-64.
- Mardiasmo. (2022). Perpajakan. Yogyakarta: Andi Offset.
- Prasetyo, A., & Ramadhani, N. (2021). Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Penghasilan. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 9(1), 112-123.
- Putri, R. N. (2022). Pengaruh Faktor Demografis Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 6(3), 175-185.
- Rahayu, S. K. (2020). Perpajakan Indonesia. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sutrisno, E. (2021). Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Yulianti, R., & Safitri, D. (2023). Pengaruh Faktor Sosial dan Ekonomi Terhadap Pelaporan Pajak Penghasilan. *Jurnal Ekonomi dan Pajak*, 12(2), 143-157. <https://doi.org/10.47134/jampk.v2i1.428>